

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban. Gray (2006) dalam Siallagan (2017) menyatakan bahwa “Akuntabilitas adalah hak komunitas atau kelompok dalam masyarakat yang timbul dari hubungan antara organisasi dan masyarakat.”¹ Sehingga, pemerintah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan kepada publik berupa penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur yang digunakan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan. Segala informasi dalam laporan keuangan dapat bermanfaat, jika laporan keuangan yang disajikan berkualitas. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja

¹ Hamonangan Siallagan, et. al., **Public Accountability Based On The Value Of Local Wisdom**, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Volume 8, Issue 8, 2017. Halaman 3

Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan disampaikan kepada Kepala Daerah. Laporan keuangan ini harus disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia.

Pada tahun 2015, seluruh pemerintah daerah telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Berdasarkan peraturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang semula terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), kini bertambah 3 (tiga) laporan, yaitu Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Penerapan akuntansi berbasis akrual ini diharapkan mampu

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah serta menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan.

Penilaian kualitas laporan keuangan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Siallagan (2020) menyatakan bahwa “Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu: dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), keandalan (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).”² Kemudian hasil penilaian kualitas laporan keuangan pemerintah ini dapat dilihat berdasarkan pemeriksaan serta penilaian lembaga independen dalam hal ini oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) setiap tahunnya.

Kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dihasilkan, hal tersebut akan berpengaruh terhadap pemberian opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada salah satu kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini atau pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK,

² Hamonangan Siallagan, **Teori Akuntansi**, Edisi Pertama, Medan: LPPM UHN Press, 2020. Halaman 136

disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, dengan 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah, sebagai berikut: 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; 2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan; 3) Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; dan 4) Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP), menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.³ Berdasarkan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan, maka dapat dilihat sejauh mana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap pemerintah daerah.

³ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), 2020, **Ragam Opini BPK**, <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, Diakses tanggal 30 Januari 2021

Diperoleh dari data yang diakses melalui website resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga dari tahun 2015-2019 secara bertahap mengalami peningkatan opini yang sangat baik. Data tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini (Gambar 1.1).

Gambar 1.1
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga
Tahun 2015 -2019



*Sumber: Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(<https://sumut.bpk.go.id/>)*

Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kota Sibolga tahun 2015 dan 2016 tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dapat dilihat dari opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sibolga yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Sibolga mengalami kendala dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, dan adanya kerugian daerah, serta penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2017 terjadi peningkatan opini LKPD Kota Sibolga menjadi opini

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terjadinya peningkatan opini yang diperoleh pemerintah Kota Sibolga ini, dikarenakan adanya perbaikan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan atas temuan BPK pada tahun sebelumnya, dan kerugian daerah tidak terlalu besar serta penyajian laporan keuangan yang sudah lebih baik dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual.

Laporan keuangan pemerintah Kota Sibolga mengalami perbaikan opini yang sangat baik pada tahun 2018 dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dilansir pada berita di laman website GATRA.com (<https://www.gatra.com/>) terkait dengan pemerintah Kota Sibolga meraih opini WTP dari BPK, Walikota Sibolga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kota Sibolga yang telah melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga telah menyusun laporan keuangan OPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akual.⁴ Hingga pada tahun 2019, pemerintah Kota Sibolga tetap dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah. Berdasarkan opini yang diraih oleh pemerintah Kota Sibolga pada tahun 2018 dan tahun 2019, memperlihatkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga menunjukkan peningkatan kualitas laporan keuangan yang sangat baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang didukung dengan

⁴ GATRA.com, 2019, **Setelah Tiga Tahun, Sibolga Kembali Raih Opini WTP**, <https://www.gatra.com/detail/news/414460/ekonomi/setelah-tiga-tahun-sibolga-kembali-raih-opini-wtp>, Diakses tanggal 31 Januari 2021

pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dapat menjadi faktor dalam pencapaian pemerintah Kota Sibolga untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan salah satu faktor yang mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah proses untuk mengerti benar tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku umum dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada publik, sehingga pemerintah dapat memberikan laporan keuangan yang berkualitas untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Namun dengan adanya keterbatasan dalam memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dapat menjadi kendala dalam mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah akan mewajibkan pegawainya untuk memahami dengan baik mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan, sehingga pegawai dapat menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar.

Tingkat pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dapat diukur berdasarkan pemahaman pegawai dalam penyajian Neraca, penyajian Laporan Realisasi Anggaran, penyajian Laporan Arus Kas, penyajian Catatan atas Laporan

Keuangan, perlakuan persediaan, perlakuan investasi, perlakuan aset tetap, perlakuan konstruksi, perlakuan kewajiban, perlakuan koreksi kesalahan, penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi dan penyajian Laporan Operasional, seperti yang dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, hal ini sangat diperlukan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berpedoman dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat memudahkan pegawai bagian keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Memahami Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan diyakini dapat memberikan solusi untuk setiap permasalahan keuangan yang terjadi dalam instansi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai salah satu faktor yang mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2019) tentang pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan kompetensi sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, yang memperoleh kesimpulan bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dalam hasil penelitiannya, ditemukan bahwa dengan pemahaman pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintah yang memadai akan mampu

meningkatkan kualitas laporan keuangan.⁵ Hal yang sama juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kholila (2019) yang meneliti tentang pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pendidikan dan Pelatihan terhadap kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.⁶

Selain pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi sebagai salah satu faktor penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokkan, penggolongan, pencatatan, pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah ke dalam sebuah laporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akurat, yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dengan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi secara maksimal tentunya akan meningkatkan tingkat kecepatan terciptanya informasi, tingkat keamanan informasi, tingkat keefisienan biaya, dan tingkat kualitas hasil, dalam proses penyusunan laporan keuangan. Sehingga,

⁵ Rizky Aulina Nur, **Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan, 2019. Halaman 75

⁶ Kholila Pohan, **Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan, 2019. Halaman 76

penting bagi setiap pegawai pemerintah untuk memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Untuk menjawab tuntutan tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memfasilitasi pemerintah daerah dengan merancang suatu sistem informasi terintegrasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Pemerintah Kota Sibolga di dalam proses penyusunan laporan keuangan menggunakan program aplikasi SIMDA ini untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. Program aplikasi SIMDA juga digunakan pemerintah Kota Sibolga untuk pengelolaan barang daerah yang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. Program aplikasi SIMDA digunakan oleh pemerintah Kota Sibolga dari tahun 2016 hingga sekarang, ini berarti program aplikasi SIMDA telah digunakan sejak pemerintah Kota Sibolga memperoleh opini laporan keuangan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 yang secara bertahap dapat meningkat menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah Kota Sibolga tentunya dapat memudahkan proses penyusunan laporan keuangan dan memberikan manfaat bagi pemerintah demi mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi sebagai salah satu faktor yang mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan ini juga diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Rafid (2016), dalam penelitiannya tentang pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas Laporan Keuangan dengan kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel moderasi, menyatakan bahwa adanya pengaruh pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi yang baik mampu meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.⁷ Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulfah (2017) tentang pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, dimana dari hasil penelitiannya mendapatkan kesimpulan yaitu Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.⁸ Oleh sebab itu, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi sebagai sarana pendukung akan menjadi satu faktor penting yang mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

⁷ Rashwan Zuhudy Rafid, **Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variable Moderasi**, Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016. Halaman 80

⁸ Indana Zulfah, et al., **Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara**, Jurnal Akuntansi dan Pembangunan STIE Lhokseumawe, Volume 3, Nomor 2, 2017. Halaman 55

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui apakah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Kota Sibolga. Sehingga, judul dari penelitian ini adalah **“PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Sibolga).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Sibolga?
2. Apakah pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Sibolga?
3. Apakah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Sibolga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Sibolga.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Sibolga.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Sibolga.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya akuntansi pemerintahan tentang pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi yang berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Diharapkan melalui penelitian ini, peneliti mendapatkan bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta akan memberikan pengalaman dalam pengembangan kemampuan ilmiah mengenai pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

b) Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait di pemerintahan Kota Sibolga dalam memenuhi pertanggungjawabannya dan dapat menjadi bahan masukan atau kontribusi yang berguna untuk meningkatkan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Kota Sibolga.

c) Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi serta memberi bukti empiris atau kajian untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil atau output dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan bahwa **“laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”**⁹ Entitas pelaporan sendiri merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Menurut Wikipedia, **“laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut.”**¹⁰ Sehingga, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu produk akhir proses akuntansi dalam sebuah entitas pada satu periode tertentu, dimana informasi di dalamnya adalah hasil pengumpulan sekaligus pengolahan data keuangan, dengan tujuan guna membantu entitas membuat keputusan atau kebijakan yang tepat.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan**

¹⁰ WIKIPEDIA Ensiklopedia Bebas, 2020, **Laporan Keuangan**, https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan#cite_note-1, Diakses tanggal 08 Februari 2021

Setiap entitas termasuk pemerintah daerah, wajib menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa **“laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.”**¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa **“laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.”**¹² Menurut Halim (2007), **“laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu.”**¹³

Erlina (2008), mengemukakan:

Laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dari

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang **Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah**

¹² Widya Andelina, **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empirik pada SKPD Kabupaten Demak)**, Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT), Volume 8, Nomor 2, November 2017. Halaman 135

¹³ Loc. Cit

pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya.¹⁴

Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁵

2.1.1.2 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Baik buruknya pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan dengan laporan keuangan yang berkualitas sebagai gambaran apakah Kepala Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan telah melaksanakan kegiatan dalam lingkup pemerintahan daerah sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Definisi kualitas menurut Iman Mulyana (2010), **“kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar,**

¹⁴ Erlina, **Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen**, Edisi Kedua, Medan: USU Press, 2008. Halaman 18

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan**, Lampiran I.01 Kerangka Konseptual. Halaman 7

diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.”¹⁶

Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa kualitas merujuk pada pengertian pemenuhan standar atau persyaratan tertentu yang mana hal tersebut dinilai melalui hasil pertanggungjawaban suatu entitas. Disamping kualitas itu menunjuk pada pengertian pemenuhan standar atau persyaratan tertentu, kualitas juga mempunyai pengertian sebagai upaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang semakin maju.

Kompasiana.com (2019), menyatakan bahwa:

Kualitas laporan keuangan merupakan suatu informasi yang dapat memudahkan pengguna dan pembaca untuk memahami dan dapat diasumsikan dalam pengetahuan yang memadai tentang suatu aktifitas ekonomi, bisnis, akuntansi serta dapat mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.¹⁷

Menurut Rosdiani (2011), **“kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur.”¹⁸** Laporan keuangan merupakan artian dari pengkomunikasian informasi keuangan kepada para pengguna laporan keuangan. Agar komunikasi ini menjadi lebih efektif, laporan keuangan yang dihasilkan harus berkualitas. Sehingga, kualitas laporan keuangan mengacu pada laporan keuangan yang dapat menjelaskan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: andal, relevan,

¹⁶ Iman Mulyana, **Manajemen dan Kehidupan Manusia**, Yogyakarta: Kanisius, 2010. Halaman 96

¹⁷ Kompasiana.com, 2019, **Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan**, <https://www.kompasiana.com/ummihidayah/5dcd555fd541df5dab7b1b02/bagaimana-kualitas-laporan-keuangan>. Diakses tanggal 10 Februari 2021

¹⁸ Hayyuning Tyas Rosdiani, **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan, dan Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan**, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011. Halaman 2

dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Kemampuan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Dengan melekatnya semua karakteristik kualitas laporan keuangan tersebut dalam laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, pemerintah akan semakin efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan serta semakin menunjukkan sikap akuntabel dan transparannya dalam mengelola keuangan.

2.1.1.3 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang telah dipercayakan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menyebutkan bahwa laporan keuangan memiliki tujuan, sebagai berikut:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;**
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;**

- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.¹⁹

Dengan ketersediaan informasi-informasi tersebut, maka diharapkan Laporan keuangan pemerintah juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, artinya dapat menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, risiko dan ketidakpastian yang terkait, serta dapat menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran termasuk kepatuhan terhadap batas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD.

2.1.1.4 Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang **Standar Akuntansi Pemerintah**, Lampiran I.02, Pernyataan SAP 01. Halaman 6

Sementara laporan finansial, terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh

entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.²⁰

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

1. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara atau daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum negara atau daerah.

2.1.1.5 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang **Standar Akuntansi Pemerintah**, Lampiran I.01 Kerangka Konseptual. Halaman 16-19

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, sebagai berikut:

a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, sebagai berikut:

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) **Netralitas**

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. **Dapat Dibandingkan**

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. **Dapat Dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.²¹

2.1.2 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

2.1.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan ialah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “**Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya**

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan**, Lampiran I.01, Kerangka Konseptual. Halaman 10-12

disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.”²² Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintahan diatur pertama sekali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan basis kas menuju basis akrual yang sifatnya sementara seperti diamanatkan dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Undang-Undang ini menyebutkan, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2008 seluruh entitas akuntansi harus sudah mengakui pendapatan dan belanja secara akrual. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan ketentuan ini tidak mudah. Dibutuhkan kesiapan dari seluruh unit entitas akuntansi, unit entitas pelaporan, unit perbendaharaan dan unit pembuat standar akuntansi untuk bersama-sama melaksanakan aksi sesuai dengan kewenangan dan peran masing-masing agar akuntansi berbasis akrual dapat diterapkan dengan baik. Dengan hal ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 diperbaharui melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Implementasi basis akrual telah mendapatkan landasan teknis pelaksanaannya yang tertuang dalam Lampiran I tentang SAP berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015.

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang **Standar Akuntansi Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (8) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan:

SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.²³

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi, yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan, diharapkan dapat memudahkan pegawai bagian keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diyakini dapat memberikan solusi untuk setiap permasalahan keuangan yang terjadi dalam instansi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

2.1.2.2 Pengertian Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

Unsur pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan. Pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman seseorang antara satu dengan yang lain tidak mungkin sama secara keseluruhan karena dalam

²³ Loc. Cit

memahami sesuatu seseorang akan dipengaruhi oleh pengalaman, ilmu, kemampuan dan hal lainnya. Adanya keterbatasan dalam memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat menjadi kendala dalam mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas.

Novi Anggraini (2017), mengemukakan bahwa:

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan sebuah proses untuk mengerti benar tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku umum dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sehingga dapat memberikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.²⁴

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang Standar Akuntansi Pemerintahan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tingkat pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah ini dapat diukur dari paham seseorang dalam penyajian Neraca, penyajian Laporan Realisasi Anggaran, penyajian Laporan Arus Kas, penyajian Catatan atas Laporan Keuangan, perlakuan persediaan, perlakuan investasi, perlakuan aset tetap, perlakuan konstruksi, perlakuan kewajiban, perlakuan koreksi kesalahan, penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi dan penyajian Laporan Operasional, dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor. Oleh karena itu, pegawai yang bertugas untuk

²⁴ Novi Anggraini, **Pengaruh Pemahaman SAP, Pemanfaatan SIKD, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2017. Halaman 15

menyajikan laporan keuangan haruslah paham tentang aturan ataupun standar pelaporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat berkualitas dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan ini diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan serta bisa menjadi informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.

2.1.2.3 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Menurut Siallagan, “Kerangka Konseptual merupakan sistem yang berhubungan dengan tujuan dan konsep yang melandasi akuntansi yang bisa menurunkan standar-standar yang konsisten dalam menggambarkan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporannya.”²⁵ Standar Akuntansi Pemerintahan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

²⁵ Hamonangan Siallagan, **Teori Akuntansi**, Edisi Pertama, Medan: LPPM UHN Press, 2020. Halaman 108

- a) penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya;
- b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar;
- c) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar; dan
- d) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Untuk jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi pemerintahan di masa depan. Kerangka konseptual ini membahas: tujuan kerangka konseptual; lingkungan akuntansi pemerintahan; pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna; entitas akuntansi dan entitas pelaporan; peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum; asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya.²⁶

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan**, Lampiran I.01 Kerangka Konseptual. Halaman 1

2.1.2.4 Indikator Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), penyusunan PSAP ini dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Menurut Rashwan Zuhudy (2016), Sari Artana (2016) dalam Novi Anggraini (2017), serta Rizky Aulina (2019), pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dapat diukur dengan beberapa indikator berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, diantaranya sebagai berikut:

1. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

2. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan pernyataan standar ini adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

4. PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

5. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

6. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

7. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

8. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan. Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk: identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Kontruksi dalam Pengerjaan, penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca, serta penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

9. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban

Tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

10. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

11. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. PSAP 12 tentang Laporan Operasional

Tujuan pernyataan standar ini adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.²⁷

2.1.3 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

2.1.3.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Informasi memegang peran yang sangat penting untuk mengetahui kegiatan apa yang telah terjadi, melakukan evaluasi apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang direncanakan dan menjamin agar data tersebut dapat diolah secara efisien menjadi informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan tepat waktu maka dalam pengolahan data tersebut diperlukan suatu alat yang dinamakan sistem informasi. Sistem Informasi Akuntansi dirancang

²⁷ Ibid, Lampiran I.02 PSAP 01- Lampiran I.13 PSAP 12

sedemikian rupa oleh suatu organisasi atau instansi sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan Sistem Informasi Akuntansi yang layak dapat dihasilkan suatu laporan yang mampu memberikan berbagai informasi yang berguna bagi pihak-pihak pengambil keputusan. Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu komponen atau sub sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyiapan informasi keuangan guna membantu dalam pembuatan keputusan. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Mei (2019), sebagai berikut:

Sistem Informasi Akuntansi adalah (a) Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi. (b) Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan/atau untuk mengendalikan organisasi. (c) Suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.²⁸

Sistem Informasi Akuntansi dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi dan terintegrasi dengan jaringan internet yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi sebuah informasi dapat lebih menghemat banyak waktu, biaya dan tenaga, bila dibandingkan dengan Sistem Informasi Akuntansi secara manual. Selain itu, informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer akan menjadi lebih akurat dan tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan secara berulang terhadap output atau

²⁸ Mei Hotma Marianti Munte, **Sistem Informasi Akuntansi**, Buku 1, Edisi Keempat, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan, 2019. Halaman 6

laporan keuangan yang dihasilkan. Unsur-unsur pada Sistem Informasi Akuntansi, terdiri dari input, proses dan output. Unsur dalam sistem ini mempunyai tiga tahapan konversi dimulai dari tahapan masukan, tahapan pemrosesan dan tahapan pengeluaran yang masing-masing mempunyai fungsi dalam pengumpulan data, pengolahan data-data dan penyediaan informasi. Input dari Sistem Informasi Akuntansi adalah transaksi atau kejadian ekonomi, misalnya penjualan secara tunai, penjualan secara kredit, pembayaran biaya-biaya, dan sebagainya. Transaksi-transaksi tersebut selanjutnya diproses dengan mencatatnya ke dalam jurnal, kemudian di posting ke rekening-rekening buku besar dan diikhtisarkan dalam berbagai macam laporan, hingga sampai pada output dari Sistem Informasi Akuntansi adalah laporan keuangan. Dengan demikian, Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer dapat diartikan sebagai proses pengelolaan data-data akuntansi (transaksi), yang dimulai dari penginputan data, kemudian penyimpanan dan pemrosesan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi berupa laporan keuangan yang didistribusikan kepada pengguna atau pihak yang berkepentingan. James A. Hall yang dialihbahasakan oleh Dewi Fitriyani (2007) pun mengatakan bahwa **“Sistem Informasi Akuntansi merupakan sekumpulan perangkat sistem yang berfungsi untuk mencatat data transaksi, mengolah data, dan menyajikan informasi akuntansi kepada pihak internal dan pihak eksternal.”**²⁹ Begitu juga menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2016), **“Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data sehingga menghasilkan**

²⁹ James A. Hall, **Sistem Informasi Akuntansi**, Buku 1, Edisi Keempat, Diterjemahkan oleh Dewi Fitriyani dan Deny Arnos, Jakarta: Salemba Empat, 2007. Halaman 10

informasi bagi pengambil keputusan.”³⁰ Menurut Bodnar dan Hopwood (2000) dalam Indah Widiastuti (2005), sebagai berikut:

Sistem Informasi Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi menjadi suatu informasi, lebih luas lagi istilah Sistem Informasi Akuntansi yang termasuk di dalamnya adalah siklus pemrosesan transaksi, pemakaian teknologi, dan pengembangan sistem informasi.³¹

Dengan adanya fasilitas jaringan Sistem Informasi Akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan semua telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Departemen Dalam Negeri telah menyediakan Sistem Informasi Akuntansi untuk dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Saat ini, Organisasi Perangkat Daerah telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi, dimana menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses, dikelola dan didayagunakan oleh berbagai pihak dan masyarakat luas. Sistem informasi tersebut dikenal dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010. Sistem Informasi Akuntansi ini diterapkan dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah oleh masing-

³⁰ Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi Ketiga Belas, Jakarta: Salemba Empat, 2016. Halaman 3

³¹ Indah Widiastuti, **Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer**, e-Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, 2005. Halaman 3

masing Organisasi Perangkat Daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010, menyatakan bahwa:

Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.³²

Sistem Informasi Keuangan Daerah memberi manfaat atau kemudahan dalam mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sehingga untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah, penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan memanfaatkan program aplikasi komputer SIMDA. Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. Dan program

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang **Sistem Informasi Keuanga Daerah**

aplikasi SIMDA juga digunakan untuk pengelolaan barang daerah yang terintegrasi dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.

2.1.3.2 Pengertian Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagai sistem yang mampu menangani proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan keuangan daerah. Dengan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi secara maksimal akan meningkatkan tingkat kecepatan terciptanya informasi, tingkat keamanan informasi, tingkat keefisienan biaya, dan tingkat kualitas hasil, hal ini sangat berperan penting dalam instansi pemerintahan untuk membantu menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang kurang maksimal dapat menghasilkan laporan keuangan menjadi kurang maksimal sehingga para pengguna tidak mendapat informasi yang bermanfaat.

Rizky Aulina (2019), menyatakan bahwa:

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu pemanfaatan sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses komputerisasi dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan oleh seluruh entitas pemerintah daerah.³³

³³ Rizky Aulina Nur, **Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan, 2019. Halaman 30

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi menurut Sari (2014), adalah:

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.³⁴

Teknologi informasi yang semakin berkembang dapat menunjang berbagai aktivitas dan operasi dalam suatu organisasi. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun jaringan Sistem Informasi Akuntansi dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan penyederhanaan akses antara unit kerja. Pemerintah yang dulunya menggunakan sistem manual sekarang beralih menggunakan Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputerisasi untuk menunjang aktivitasnya. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dapat membantu pegawai bagian keuangan untuk menciptakan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada publik. Pada umumnya tujuan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan teknologi informasi pada instansi pemerintah lebih menekankan pada tingkat pengurangan kesalahan dalam memproses transaksi yang selama ini dilakukan secara manual dan memberikan informasi laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu yang dapat digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan, sehingga memberikan dampak yang luar biasa mengingat instansi pemerintah

³⁴ Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, et. al., **Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**, e-Journal Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, 2014. Halaman 3

merupakan sektor publik yang paling tinggi tingkat ketergantungannya pada aktivitas-aktivitas pengumpulan dan pemrosesan.

2.1.3.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Secara umum Sistem Informasi Akuntansi bertujuan untuk mengumpulkan serta menyimpan semua data mengenai aktivitas dan juga transaksi, memproses data menjadi sebuah informasi yang bisa dipakai dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan, melakukan kontrol secara tepat terhadap semua aset, mengefisiensikan biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan serta menyajikan data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi menurut Mei (2019), adalah sebagai berikut:

1. **Mendukung operasi rutin dari suatu entitas untuk memproses peristiwa-peristiwa bisnis (transaksi). Pemrosesan transaksi dilakukan terhadap transaksi akuntansi maupun terhadap transaksi non akuntansi. Transaksi non akuntansi merupakan transaksi yang mendukung transaksi akuntansi. Transaksi akuntansi adalah transaksi yang dicatat atau diproses yang menunjukkan pertukaran yang memiliki nilai tambah ekonomis.**
2. **Mendukung pembuatan keputusan oleh manajemen entitas.**
3. **Memenuhi keharusan atau kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban atas pengurusan entitas (*stewardship*) kepada *stakeholder* eksternal dari suatu entitas.³⁵**

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sehingga dalam Peraturan

³⁵ Mei Hotma Marianti Munte, **Sistem Informasi Akuntansi**, Buku 1, Edisi Keempat, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan, 2019. Halaman 9

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, pemerintah daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan tujuan, antara lain:

- a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah,
- b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah,
- c. membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah,
- d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah,
- e. menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat,
- f. mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional.³⁶

2.1.3.4 Indikator Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Dewi Rianisanti (2017) dalam Rizky Aulina (2019), indikator yang digunakan dalam mengukur pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi ialah tingkat kecepatan, tingkat keamanan, tingkat efisiensi biaya, dan tingkat kualitas hasil.

1. Tingkat Kecepatan

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang tercipta tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan dengan cepat. Faktor kecepatan dalam mendapatkan informasi sering menyebabkan menjadi mahalnya informasi. Masalah kecepatan proses pengolahan data sampai menjadi informasi dalam sebuah sistem informasi ini akan terjawab jika sistem informasi didukung oleh teknologi informasi.

2. Tingkat Keamanan

Sebuah informasi disebut akurat jika informasi tersebut tidak bias atau menyesatkan dan jelas maksudnya. Akurasi informasi dapat dipelihara atau terganggu oleh beberapa hal, seperti kelengkapan informasi, kebenaran informasi dan keamanan informasi.

³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

3. Tingkat Keefisienan Biaya

Di dalam sistem informasi akuntansi yang sudah berbasis komputer hanya dibutuhkan satu operator sistem saja yang bertugas sebagai *entry* data transaksi selebihnya proses pengolahan data dilakukan secara otomatis sehingga operator yang ada bisa dialokasikan untuk melaksanakan pekerjaan yang lain.

4. Tingkat Kualitas Hasil

Dalam sistem informasi, kualitas informasi (*quality of information*) juga digunakan untuk menyatakan informasi tersebut baik atau tidak. Kualitas informasi sering diukur berdasarkan relevansi, ketepatan waktu dan keakurasian.³⁷

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan” yang penulis jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai pendukung dalam proses penelitian baik sebagai acuan maupun sebagai referensi. Untuk lebih jelas berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Linna Yuliana (2016), Kholila Pohan (2019), Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, et.al. (2014), Rizky Aulina Nur (2019), Indana Zulfah, et.al. (2017), Rashwan Zuhudy Rafid (2016) dan Novi Anggraini (2017).

Linna Yuliana (2016) dengan judul pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, pengalaman kerja dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, memiliki

³⁷ Rizky Aulina Nur, **Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan, 2019. Halaman 30

beberapa persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Persamaannya terdapat pada variabel bebas yang digunakan, yaitu pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi serta kualitas laporan keuangan yang menjadi variabel terikat. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yaitu data berupa kuesioner, dimana responden menjawab pernyataan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, pengalaman kerja, dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kholila Pohan (2019) dengan judul Pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pendidikan dan Pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Persamaannya terdapat pada variabel bebas yang digunakan, yaitu pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan kualitas laporan keuangan yang menjadi variabel terikat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh bendahara, Kasubbag Keuangan dan staf Kasubbag Keuangan yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Hasil penelitian secara parsial dan simultan membuktikan bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan

dan Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, et.al., (2014) dengan judul pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Persamaannya terdapat pada variabel bebas yang digunakan, yaitu pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi serta kualitas laporan keuangan yang menjadi variabel terikat. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah secara parsial dan simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi keuangan daerah merupakan faktor yang efektif dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jembrana. Untuk itu, disarankan kedepannya agar pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi keuangan daerah lebih ditingkatkan untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Rizky Aulina Nur (2019) dengan judul pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan

kompetensi sumberdaya manusia serta kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Persamaannya terdapat pada variabel bebas yang digunakan, yaitu pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi serta kualitas laporan keuangan yang menjadi variabel terikat. Penelitian ini menggunakan data primer, data diperoleh dari kantor Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu bagian keuangan atau akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Indana Zulfah, et.al., (2017) dengan judul pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan kualitas laporan keuangan, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Persamaannya terdapat pada variabel bebas yang digunakan, yaitu Sistem Informasi Akuntansi serta kualitas laporan keuangan yang menjadi variabel terikat. Penelitian ini menggunakan instrument kuesioner dalam pengumpulan data, adapun kuesioner yang dibagikan kepada responden berisi butir pertanyaan mengenai variabel Sistem Informasi Akuntansi dan kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas laporan keuangan dan Sistem Informasi Akuntansi memiliki kemampuan dalam menjelaskan

pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan serta Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.

Rashwan Zuhudy Rafid (2016) dengan judul pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel moderasi, memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Persamaannya terdapat pada variabel bebas yang digunakan, yaitu pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi serta kualitas laporan keuangan yang menjadi variabel terikat. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dengan cara penyebaran kuesioner. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan serta kompetensi Sumber Daya Manusia memoderasi hubungan antara pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya dengan pemahaman pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang memadai akan mampu meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi yang baik akan mampu menghasilkan informasi keuangan yang baik dan memenuhi

krakteristik kualitatif sehingga informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pengguna laporan keuangan.

Novi Anggraini (2017) dengan judul pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal serta kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Persamaannya terdapat pada variabel bebas yang digunakan, yaitu pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi serta kualitas laporan keuangan yang menjadi variabel terikat. Penelitian ini menggunakan data primer, data diperoleh dari Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan menyebarkan kuesioner kepada responden bagian keuangan atau akuntansi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan maupun secara parsial, pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas juga dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Tabel 2.1).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Linna Yuliana (2016)	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, pengalaman kerja dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi serta kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2.	Kholila Pohan (2019)	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pendidikan dan Pelatihan serta kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Secara parsial membuktikan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Secara parsial membuktikan bahwa Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Secara simultan membuktikan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3.	Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, et.al. (2014)	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah serta kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Secara simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.	Rizky Aulina Nur (2019)	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan kompetensi Sumberdaya Manusia serta kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) paling berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kompetensi Sumberdaya Manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan kompetensi Sumberdaya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5.	Indana Zulfah, et.al. (2017)	Sistem Informasi Akuntansi dan kualitas laporan keuangan	Sistem Informasi Akuntansi mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas laporan keuangan Sistem informasi akuntansi memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
6.	Rashwan Zuhudy Rafid (2016)	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi serta kualitas laporan keuangan, kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel moderasi	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kompetensi Sumber Daya Manusia memoderasi hubungan antara pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Kompetensi Sumber Daya Manusia memoderasi hubungan antara pengaruh pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

7.	Novi Anggraini (2017)	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal serta kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
----	-----------------------	--	---

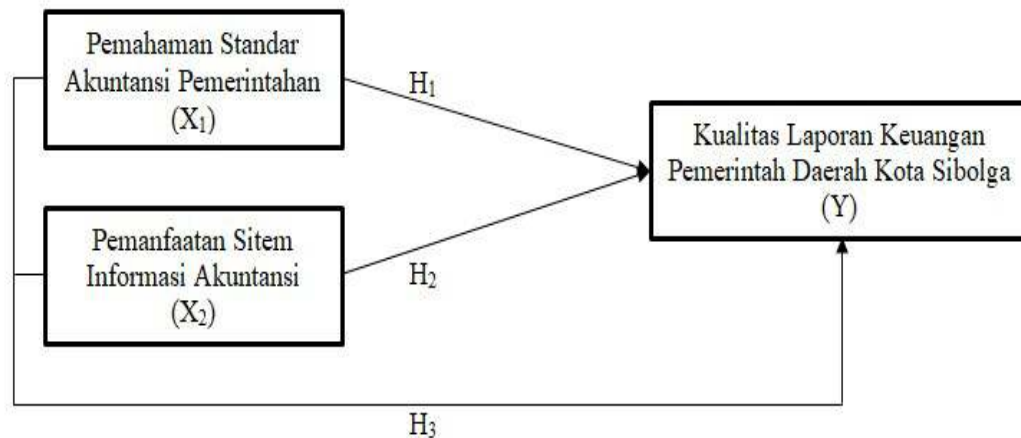
Sumber: Kumpulan Penelitian Tahun 2014-2019 (<https://scholar.google.co.id/>)

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antara variabel terikat (*Dependent Variable*) dan variabel bebas (*Independent Variable*). Peneliti menggunakan 2 (dua) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya ialah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X_2). Dan variabel dependen dalam penelitian ini, ialah kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga (Y). Kerangka berpikir ini akan membantu dalam mempermudah jalan pemikiran untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Berdasarkan uraian di atas, maka model kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut (Gambar 2.1).

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah harus membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada publik. Laporan pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan yang harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai upaya untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan memuat proses alur penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara jelas. Oleh karena itu, penting bagi setiap pegawai untuk dapat memahami Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat membantunya untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan.

Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan ini diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dapat diukur dari tingkat pemahaman pegawai bagian keuangan dalam penyajian Neraca, penyajian Laporan Realisasi Anggaran, penyajian Laporan Arus Kas, penyajian Catatan atas Laporan Keuangan, perlakuan persediaan, perlakuan investasi, perlakuan aset tetap, perlakuan konstruksi, perlakuan kewajiban, perlakuan koreksi kesalahan, penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi dan penyajian Laporan Operasional, seperti yang dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dengan demikian dapat disimpulkan, pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan.

Sehingga untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kurangnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah yang dimiliki oleh pegawai akan berdampak pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akan semakin menurun. Sebaliknya, bertambahnya pemahaman Standar Akuntansi

Pemerintah yang dimiliki pegawai akan berdampak pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah semakin meningkat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizky (2019) tentang pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan kompetensi sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan memperoleh hasil penelitian, yaitu pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dalam hasil penelitiannya, ditemukan bahwa dengan pemahaman pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintah yang memadai akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal yang sama juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kholila (2019) yang meneliti tentang pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pendidikan dan Pelatihan terhadap kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyatakan bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama dapat dirumuskan:

H₁ : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.4.2 Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi sangat berperan penting dalam instansi pemerintahan untuk membantu menyusun laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010. Sistem Informasi Akuntansi didefinisikan sebagai sistem yang mampu menangani proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan keuangan daerah. Sehingga, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu pemanfaatan sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses komputerisasi dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan oleh seluruh entitas pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan memerlukan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi untuk dapat memproses data dengan cepat dan akurat sehingga informasi keuangan dapat disajikan dengan tepat waktu dan berkualitas. Dengan ini pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi secara maksimal akan meningkatkan tingkat kecepatan terciptanya informasi, tingkat keamanan informasi, tingkat keefisienan biaya, dan tingkat kualitas hasil, hal ini sangat berperan penting dalam instansi pemerintahan untuk membantu menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Sistem Informasi Akuntansi dapat membantu dalam penyajian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Jika kualitas Sistem Informasi Akuntansi berjalan dengan baik, maka semua proses akan berjalan dengan lancar, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Dengan adanya fasilitas jaringan Sistem Informasi Akuntansi yang dirancang

khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan semua telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Dengan demikian, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu.

Adanya pengaruh pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan ini telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rafid (2016) dalam penelitiannya yang tentang pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel moderasi memperoleh hasil penelitian, bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi, pemanfaatan sistem akuntansi yang baik mampu meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulfah (2017) tentang pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, dimana dari hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan yaitu Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dapat dirumuskan:

H₂ : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.4.3 Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dengan pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, tentunya diharapkan mampu memahami bagaimana poses penyusunan laporan keuangan, dimulai dari penyajian Neraca, penyajian Laporan Realisasi Anggaran, penyajian Laporan Arus Kas, penyajian Catatan atas Laporan Keuangan, perlakuan persediaan, perlakuan investasi, perlakuan aset tetap, perlakuan konstruksi, perlakuan kewajiban, perlakuan koreksi kesalahan, penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi dan penyajian Laporan Operasional, sehingga peningkatan kualitas laporan keuangan dapat tercapai. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip atau pedoman akuntansi yang harus dipahami oleh seorang pegawai dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan ini berarti kemampuan diri dalam mengerti atau mengetahui dengan benar tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam hal ini, pegawai pengelola keuangan yang memiliki wawasan dan pengertian pengetahuan yang mendalam mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat memenuhi kriteria laporan keuangan yang berkualitas. Apabila semua pegawai yang mengemban fungsi akuntansi atau keuangan memiliki pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, tentunya hal ini akan sejalan dengan hasil kerja seperti penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Meningkatnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan akan semakin baik bila didukung dengan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

sebagai sarana untuk mempercepat pengelolaan keuangan dalam meningkatkan tingkat kecepatan terciptanya informasi, tingkat keamanan informasi, tingkat keefisienan biaya, dan tingkat kualitas hasil untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi merupakan penerapan sistem yang telah dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu. Dengan dimanfaatkannya Sistem Informasi Akuntansi sebagai satu sarana pendukung tentunya akan menciptakan efektifitas dan efisiensi kerja yang akan berpengaruh pada hasil kerja seperti penyusunan laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Oleh sebab itu, apabila seluruh pegawai telah memahami Standar Akuntansi Pemerintahan dan bila hal itu juga dikombinasikan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi yang terkomputerisasi tentu output berupa laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sari (2014) tentang pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hasil yang diperoleh yaitu secara simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, artinya apabila pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah semakin meningkat secara simultan, maka akan diikuti oleh peningkatan

yang signifikan pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga, apabila Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dapat terlaksana dan dimiliki oleh setiap pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau keuangan, tentu akan semakin mampu mempengaruhi penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan:

H₃ : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB III METODOLOGI

PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih, dimana terdapat variabel independen (yang mempengaruhi) dan variabel dependen (yang dipengaruhi). Pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang menekankan pada pengujian teori-teori atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka (*quantitative*) dan melakukan analisis data dengan prosedur statis dan pemodelan sistematis.³⁸

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pemerintahan Kota Sibolga pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kota Sibolga. Penelitian ini dimulai pada bulan April 2021 sampai dengan selesai. Peneliti memilih pemerintahan Kota Sibolga sebagai tempat riset karena dari tahun 2018-2019 kota Sibolga telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang sebelumnya pemerintah Kota Sibolga sempat mengalami penurunan opini pada tahun 2015-2016 dengan memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Peneliti

³⁸ Sujoko Efferin, **Metode Penelitian Akuntansi**, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008. Halaman 47

ingin mengetahui apakah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi merupakan faktor pencapaian pemerintah Kota Sibolga dalam mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan SKPD/OPD.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan objek penelitian. V. Wiratna Sujarweni (2014) menyatakan, bahwa populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan.³⁹ Sedangkan, menurut Sugiyono dalam Suryani dan Hendrayadi (2015), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.⁴⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang memiliki peran penting dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah pada pemerintahan Kota Sibolga (26 OPD). Berikut ini daftar Organisasi Perangkat Daerah pada pemerintah Kota Sibolga (Tabel 3.1).

³⁹ V. Wiratna Sujarweni, **Metodologi Penelitian**, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014. Halaman 65

⁴⁰ Suryani dan Hendrayadi, **Metode Riset Kuantitatif**, Jakarta: Mrenadamedia Grup, 2015. Halaman 192

Tabel 3.1
Populasi Penelitian
OPD Pemerintah Kota Sibolga

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.	Sekretariat Daerah Kota Sibolga
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga
3.	Inspektorat Kota Sibolga
4.	Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga
8.	Dinas Sosial Kota Sibolga
9.	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga
11.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
12.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga
15.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga
16.	Dinas Perhubungan Kota Sibolga
17.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
18.	Dinas Perpustakaan Kota Sibolga
19.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga
20.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga
22.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga
23.	Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Kota Sibolga
24.	RSU Dr. F.L. Tobing Sibolga Kota Sibolga
25.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga
26.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi keseluruhan. Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasikan terhadap populasi.⁴¹ Pengambilan sampel terhadap responden akan dilakukan secara *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan sehingga dapat mendukung penelitian. Kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai bidang keuangan yang memiliki peran penting dalam menyusun laporan keuangan pada masing-masing SKPD/OPD pemerintah Kota Sibolga, seperti: Koordinator Penatausahaan Keuangan, Bendahara dan Pengurus Barang. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, maka sampel yang diambil menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 78 orang yang berada pada tiap-tiap OPD Pemerintah Kota Sibolga (26 OPD).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh data dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahuinya.⁴² Sedangkan menurut Sugiono, kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan

⁴¹ Ibid. Halaman 193

⁴² Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik**, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013. Halaman 194

kepada responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian.⁴³ Metode kuesioner yang digunakan adalah metode kuesioner tertutup, dimana responden tidak diberi kesempatan menjawab dengan kata-kata sendiri. Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta bantuan salah satu pegawai pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner tersebut.

3.5 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Penelitian

Menurut Syofian Siregar (2013), variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka atau juga dapat diartikan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah-ubah.⁴⁴ Dalam penelitian ini, variabel-variabel penelitian diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (α_1) dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (α_2), serta kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen (β).

⁴³ Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Bandung: Alfabeta, 2011. Halaman 142

⁴⁴ Syofian Siregar, **Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. Halaman 10

3.5.1.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (*independent*).⁴⁵ Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Sibolga (Y). Kualitas laporan keuangan merupakan suatu taraf pertanggungjawaban pengelolaan keuangan menjadi satu informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu periode. Laporan keuangan yang memiliki keempat karakteristik tersebut tentunya akan mampu memberikan informasi yang lengkap untuk digunakan menjadi alat perencanaan pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan beberapa indikator berdasarkan karakteristik kualitatif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

3.5.1.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*dependent*).⁴⁶ Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (\mathbb{Z}_1) dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (\mathbb{Z}_2). Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (\mathbb{Z}_1) adalah kemampuan memahami standar-standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum dalam rangka

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 2005. Halaman 33

⁴⁶ Loc. Cit

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dapat diukur dengan beberapa indikator berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu: penyajian Neraca, penyajian Laporan Realisasi Anggaran, penyajian Laporan Arus Kas, penyajian Catatan atas Laporan Keuangan, perlakuan persediaan, perlakuan investasi, perlakuan aset tetap, perlakuan konstruksi, perlakuan kewajiban, perlakuan koreksi kesalahan, penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi dan penyajian Laporan Operasional.

Selain pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi juga sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu tingkat kecepatan, tingkat keamanan, tingkat efisiensi biaya, dan tingkat kualitas hasil.

3.5.2 Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan proses mendefinisikan variabel dengan tegas sehingga menjadi faktor-faktor yang dapat diukur. Tujuan dari definisi operasional adalah memberikan kejelasan akan variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian sehingga variabel-variabel tersebut dapat diukur.⁴⁷

Tabel 3.2
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (M ₁)	Memahami prinsip-prinsip akuntansi dan standar pelaporan keuangan yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Penyajian Neraca Penyajian LRA Penyajian LAK Penyajian CALK Perlakuan Persediaan Perlakuan Investasi Perlakuan Aset Tetap Perlakuan Konstruksi Perlakuan Kewajiban Perlakuan Koreksi Kesalahan Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi Penyajian Laporan Operasional	Skala Likert
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (M ₂)	Dapat menerapkan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan.	Tingkat kecepatan Tingkat keamanan Tingkat efisiensi Tingkat kualitas hasil	Skala Likert
Kualitas Laporan Keuangan (M ₃)	Tolak ukur (tingkat baik buruknya) yang menunjukkan konsistensi dan kelengkapan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Relevan Andal Dapat dibandingkan Dapat dipahami	Skala Likert

⁴⁷ Novi Anggraini, **Pengaruh Pemahaman SAP, Pemanfaatan SIKD, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2017. Halaman 30

3.6 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yang hasilnya dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari tempat objek penelitian dan melengkapinya dengan data yang diperoleh dari responden. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban responden pada kuesioner yang dibagikan oleh peneliti.

3.7 Skala Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, maka variabel yang akan diukur, dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan skala likert, dimana disediakan 5 (lima) alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang diberi bobot 1-5 (Tabel 3.3).

Tabel 3.3
Skala Pengukuran Likert

Alternatif Jawaban	Bobot
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2012:133)

3.8 Metode Analisis Data

3.8.1 Uji Kualitas Data

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliabel, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian.

3.8.1.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.⁴⁸ Berdasarkan definisi tersebut, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah instrumen dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Suatu alat ukur dikatakan valid bila melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk menentukan validitasnya digunakan formula tertentu, diantaranya menggunakan rumus korelasi *Product Moment*, sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N\sum x^2 - (\sum x)^2\}\{N\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik**, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010. Halaman 211

Keterangan:

r_{xy} = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

n = jumlah responden

X_i = skor untuk masing masing item pernyataan

ΣX_i = total skor dari seluruh item pernyataan untuk masing-masing responden

3.8.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrument yang baik tidak akan bersifat tendensius (memihak) mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu.⁴⁹ Keandalan pengukuran menggunakan *Cronbach Alpha* adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik item atau butir dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. Adapun kriteria untuk pengujian reliabilitas, yaitu reabilitas suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. Untuk menentukan reliabilitas instrument digunakan rumus *Cronbach Alpha*, sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum X_i^2}{n \sigma^2} \right]$$

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013. Halaman 221

Keterangan:

r_{11} = koefisien reliabilitas instrument

k = banyaknya butir pernyataan atau pertanyaan

$\sum \sigma_{ij}^2$ = jumlah varian butir

σ_{ij}^2 = varian total

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi.

3.8.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas, yaitu dengan melihat penyebaran data pada grafik *Normal P-P Plot of Regresion Standardized Residual* atau dengan uji *One Sample Kolmogrov Smirnov*. Pengujian data dengan metode *Kolmogrov Smirnov*, dimana distribusi data akan dikatakan normal apabila menghasilkan nilai residu lebih besar dari 0,05. Sedangkan, uji *normal probability plot* atau ada pula yang menyebutnya dengan nama uji *P-P Plot* merupakan salah satu alternatif yang cukup efektif untuk mendeteksi apakah model regresi yang akan di analisis dalam sebuah penelitian berdistribusi normal atau tidak. Untuk

mendeteksi kenormalan nilai residual ini dapat dilakukan dengan cara melihat titik-titik plotting dari hasil output SPSS. Adapun ketentuannya adalah jika titik-titik atau data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya, maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Sementara itu, jika titik-titik menjauh atau tersebar dan tidak mengikuti garis diagonal maka hal ini menunjukkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal.

3.8.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan korelasi antar variabel independen yang kuat. Model regresi jika terjadi korelasi antar variabel, maka diartikan terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antara variabel bebas satu terhadap variabel bebas lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang dapat dilihat dari output SPSS, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.
- 2) Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan metode grafik. Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.9 Pengujian Hipotesis

3.9.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda. Model analisis berganda, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random, yang berarti mempunyai distribusi probabilitas dan variabel independen diasumsikan memiliki nilai tetap dalam pengambilan sampel yang berulang. Persamaannya regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

a = Konstanta

X_1 = Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

X_2 = Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

β_1, β_2 = Koefisien regresi X_1, X_2

e = *error term*, tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

3.9.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai koefisien determinasi yang mendekati 0 (nol), menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang semakin terbatas. Sedangkan nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 (satu), menunjukkan semakin kuat kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen atau variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.9.3 Uji Regresi Parsial (Uji t)

Pengujian regresi parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis dengan

membandingkan nilai t_{hitung} dan nilai t_{tabel} . Tingkat signifikansi yang digunakan yakni sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Uji t dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikan t_{hitung} pada masing-masing variabel yang terdapat pada t output hasil regresi menggunakan SPSS. Dengan ketentuan, apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima dengan pengertian secara parsial variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak dengan pengertian secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.9.4 Uji Regresi Simultan (Uji F)

Pengujian regresi simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dan nilai F_{tabel} . Tingkat signifikansi yang digunakan yakni sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dengan ketentuan, apabila nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima dengan pengertian secara simultan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai F_{hitung} lebih kecil dari nilai F_{tabel} dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak dengan pengertian secara simultan variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.